

# ANALISIS TREN ANGKA PUTUS SEKOLAH PADA PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN BANTUL

## *THE ANALYSIS OF PRIMARY EDUCATION DROPOUT RATES TREND IN BANTUL REGENCY*

Oleh: Nur Aini Widyastuti, Universitas Negeri Yogyakarta  
[nur695.2017@student.uny.ac.id](mailto:nur695.2017@student.uny.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk: menggambarkan tren jumlah APtS pada pendidikan dasar, mendeskripsikan faktor penyebab perubahan garis tren APtS pada pendidikan dasar, dan mendeskripsikan kebijakan dan tindak lanjut untuk mengurangi APtS di Kabupaten Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Data diperoleh dari Dikpora Bantul dan dianalisis dengan tren kuadrat terkecil. Hasil penelitian: 1. Jenjang SD/MI mengalami tren naik dan belum mencapai 0%. Jenjang SMP/MTs mengalami tren turun dan sudah mencapai 0%; 2. Hasil analisis tren dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal penyebab anak putus sekolah; 3. Kebijakan Bidang SD yaitu menggiatkan program wajib belajar, bantuan sosial, dan sekolah inklusi. Tindak lanjut bidang SD dengan peningkatan penyadaran kepada masyarakat, kerjasama dengan berbagai lintas instansi. Bidang SMP melakukan kebijakan penuntasan program wajib belajar 9 tahun, bantuan simultan, dan *tracing* sampai tingkat desa. Tindak lanjut bidang SMP dengan meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), memaksimalkan daya dukung, dan diskusi dengan Komisi D.

Kata Kunci: Tren, Angka Putus Sekolah, Pendidikan Dasar, Kabupaten Bantul

### **Abstract**

*The purpose of this study are: to describe the tren of children's dropping out rates from primary education, describe the factors that influence the change in the tren line of children dropping out of school in primary education in Bantul Regency, and describes policies and follow-up actions taken by the government to reduce dropout rates in Bantul Regency. This research is a descriptive quantitative research. The data was obtained from the Dikpora Bantul and analyzed with the least squares trend. The results of this study are: 1. At elementary level (SD/MI) in Bantul Regency, there is an increasing tren and has not reached 0%. At junior high level (SMP/MTs), there is a decreasing tren and has been reached 0%. 2. The results of tren analysis are influenced by internal and external factors that cause children to drop out of school; 3. Policy in the Elementary School sector, namely to activate compulsory education programs, social assistance, and inclusive schools. Follow-up in the SD sector by increasing public awareness, collaboration with various cross-agency. The SMP sector carries out a policy of completing the 9-year compulsory education program, simultaneous assistance, and tracing to the village level. Follow-up in the field of SMP by increasing Minimum Service Standards, maximizing support capacity, and discussing with Commission D.*

*Keywords: Trends, Dropout Rate, Primary Education, Bantul Regency*

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam mencapai cita-cita dan

tujuan dari sebuah negara. Bahkan pengalaman empiris telah membuktikan jika negara-negara maju adalah negara yang

memulai pembangunannya melalui sektor pendidikan. Pemerintah berkewajiban untuk mampu memberikan layanan pendidikan yang murah, mudah, dan berkualitas bagi masyarakat. Sebagai bentuk komitmen dari pemerintah Indonesia maka dibentuklah program wajib belajar untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Program wajib belajar dapat memberikan layanan pendidikan dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pendidikan dasar merupakan pendidikan yang terbagi menjadi dua jenjang yakni SD/MI dan SMP/MTs. Pendidikan dasar menjadi pondasi penting bagi pendidikan selanjutnya. Hal ini dikarenakan pendidikan menengah dan tinggi merupakan kelanjutan dan kesinambungan dari pendidikan dasar.

Program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan diklaim telah berhasil oleh Direktur Jenderal Pendidikan Menengah (Dirjen Dikmen) Kemendikbud (Republika.com, 2014). Tetapi, faktanya sampai saat ini masih banyak anak Indonesia yang belum bisa mengakses pendidikan formal. Pada tahun 2019 angka putus sekolah di Indonesia sebanyak 4.336.503 dari berbagai jenjang pendidikan. Nilai tersebut sebanyak 6 persen dari 53 juta anak usia sekolah (Medcom.id, 2020). Data UNICEF pada tahun 2016 menunjukkan bahwa

sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat mengenyam pendidikan lanjutan yakni anak usia Sekolah Dasar (SD) sebanyak 600 ribu anak dan untuk jenjang usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 1,9 juta anak.

Persoalan anak putus sekolah pada pendidikan dasar menjadi perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Bantul. Angka putus sekolah merupakan jumlah penduduk usia sekolah yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pada suatu jenjang tertentu. Penyebab tingginya angka putus sekolah disebabkan karena faktor internal dan eksternal (Ridwan, Irawaty, dan Momo, 2019). Faktor internal seperti motivasi belajar, kompetensi, dan psikologis anak. Untuk faktor eksternalnya seperti orang tua (perhatian dan ekonomi) dan lingkungan (teman sebaya, budaya setempat, dan sekolah).

Pada tahun 2020 persentase jumlah anak putus sekolah di Kabupaten Bantul sebesar 0,04% untuk jenjang SD/MI dan 0% untuk jenjang SMP/MTs (Dikpora Bantul). Angka putus sekolah di Kabupaten Bantul disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, latar belakang ekonomi, hal ini didukung dengan anak usia sekolah yang terpaksa putus sekolah karena harus merantau ke luar kota

untuk bekerja (Kompas.com, 2008). *Kedua*, kesadaran orang tua, hal ini dibuktikan dengan masih terdapat kelompok masyarakat yang berpikir bahwa anak perempuan tidak perlu untuk melanjutkan sekolah sampai ke jenjang yang lebih tinggi (BeritaSatu, 2016).

Permasalahan anak putus sekolah patut menjadi perhatian semua pihak karena berdampak buruk di semua sektor. Unicef Indonesia mengungkapkan bahwa dampak yang ditimbulkan oleh anak yang mengalami putus sekolah yaitu anak kehilangan peluang untuk mengembangkan potensi penuh mereka, minimnya keterampilan akademik dasar, serta pengangguran anak yang minim keterampilan. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Rembulan dan Afdhal (2019) bahwa dampak yang ditimbulkan dari adanya anak putus sekolah yaitu kurangnya wawasan/pengetahuan anak, menciptakan pengangguran, dan pernikahan dini. Dampak yang dapat ditimbulkan dari tingginya angka putus sekolah juga berdampak pada lingkungan sekitar seperti meningkatnya angka kenakalan remaja (*klitih*, tawuran, pencurian, dan sebagainya).

Adanya anak putus sekolah menjadi suatu acuan bagi pemerintah daerah untuk dapat melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Diperlukan langkah strategis dari pemerintah Kabupaten

Bantul untuk dapat menurunkan angka putus sekolah hingga 0% baik di jenjang SD/MI maupun SMP/MTs. Upaya ini dapat ditempuh jika pemerintah memiliki suatu analisis untuk dapat memprediksi jumlah anak putus sekolah pada pendidikan dasar.

Adanya prediksi ini diharapkan pemerintah Kabupaten Bantul mampu melihat berapa banyak anak putus sekolah pada pendidikan dasar yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Sehingga, bertambahnya jumlah anak putus sekolah dapat diprediksi dan diatasi sejak awal. Prediksi dengan menggunakan metode analisis tren tipe kuadrat terkecil menjadi dasar bagi pemerintah Kabupaten Bantul untuk dapat melakukan perencanaan jangka panjang. Ketepatan hasil analisis tren yang dilakukan dapat mempresentasikan kebijakan apa yang perlu diupayakan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bantul.

Kabupaten Bantul merupakan kabupaten terpadat kedua di DIY setelah Kabupaten Sleman. Jumlah penduduk di Kabupaten Bantul pada tahun 2019 sebanyak 949.325 jiwa, dengan kepadatan penduduk 1.872,99 jiwa/km<sup>2</sup> (Bantulkab.go.id). Kabupaten Bantul melalui Dikpora Bantul mempunyai visi “Cerdas Sehat Berakhlak Mulia Berkepribadian Indonesia” sebagai

kabupaten dengan visi tersebut diperlukan pengembangan kebijakan yang tepat di segala jenjang pendidikan baik SD/MI maupun SMP/MTs.

Angka putus sekolah pada pendidikan dasar telah menjadi perhatian dari pemerintah Kabupaten Bantul ketika di tahun 2015 angka putus sekolah pada masing-masing jenjang SD/MI dan SMP/MTs sebanyak 0,02% hingga tahun 2020 mencapai 0,04% untuk jenjang SD/MI dan 0% untuk jenjang SMP/MTs (Dikpora Bantul). Melihat hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini terkait dengan Analisis Tren Angka Putus Sekolah pada Pendidikan Dasar di Kabupaten Bantul.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan analisis tren dengan menggunakan data sekunder berupa jumlah kasus anak putus sekolah pada pendidikan dasar (SD dan SMP) di Kabupaten Bantul.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul. Lokasi ini dipilih untuk melanjutkan analisis awal mengenai trend

jumlah kasus anak putus sekolah di Kabupaten Bantul. Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan yaitu pada bulan Februari-April 2021.

### **Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian untuk dapat memperoleh informasi dengan narasumber penelitian yaitu, Kepala Bidang Bina Program Dikpora Bantul, Kepala Bidang SD Dikpora Bantul, dan Kepala Bidang SMP Dikpora Bantul.

## **Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Instrumen penelitian**

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara. Pedoman wawancara yang digunakan pada peneliti ini berkaitan dengan masalah analisis tren angka putus sekolah pada pendidikan dasar di Kabupaten Bantul.

### **2. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Studi Dokumen**

Metode dokumen merupakan pengumpulan data yang digunakan untuk dapat menghimpun catatan-catatan peristiwa di masa lalu. Pada

penelitian ini peneliti mengumpulkan data sekunder yang berasal dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul terkait permasalahan anak putus sekolah pada pendidikan dasar di tahun 2015-2020.

b. Wawancara

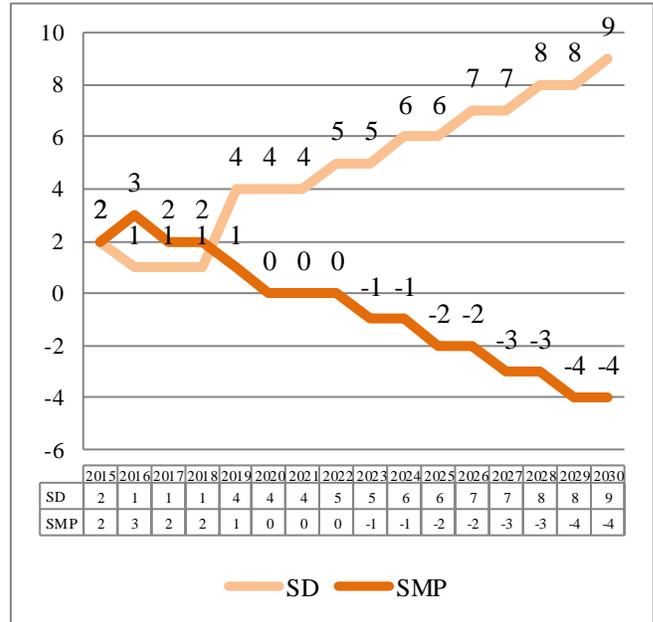
Metode wawancara yang digunakan pada penelitian ini digunakan sebagai pendukung data yang telah didapatkan oleh peneliti sebagai pendukung dan pelengkap hasil penelitian. Proses wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan narasumber Kepala Bidang SD dan Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul.

**Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tren metode jumlah kuadrat terkecil (*least square*) dengan rumus  $\hat{Y}=a+bX$ . Data hasil wawancara digunakan peneliti sebagai pelengkap dalam pengumpulan data. Peneliti menggunakan metode reduksi, merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Tren Angka Putus Sekolah Pada Pendidikan Dasar di Kabupaten Bantul**



Gambar 1. Grafik Tren Angka Putus Sekolah Pada Pendidikan Dasar di Kabupaten Bantul

Angka putus sekolah berfungsi untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan di suatu daerah. Angka putus sekolah yang rendah atau bahkan 0% menggambarkan pembangunan dibidang pendidikan yang baik dan merata. Hal ini sejalan dengan pendapat Nugroho (2008:64) bahwa angka putus sekolah menjadi indikator kinerja keberhasilan pembangunan dari suatu daerah.

Berdasarkan hasil dari analisis trend dengan menggunakan metode kuadrat

terkecil yang telah dilakukan dalam penelitian ini, angka putus sekolah pada setiap jenjang pendidikan mengalami trend yang bervariasi. Trend untuk jenjang SD/MI mengalami trend yang naik (positif). Sehingga, terjadi peningkatan anak putus sekolah untuk prediksi sejak tahun 2021 sampai dengan 2030. Tingginya angka putus sekolah di jenjang SD/MI mengindikasikan buruknya akses pendidikan.

Pada jenjang SMP/MTs di Kabupaten Bantul mengalami trend turun (negatif). Sehingga kasus anak putus sekolah pada jenjang tersebut telah mencapai 0%. Partisipasi pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Bantul telah mencapai angka 100% pada tahun-tahun mendatang. Angka putus sekolah yang telah mencapai 0% untuk jenjang SMP/MTs menunjukkan bahwa keterjangkauan dan pemerataan pendidikan telah berhasil diupayakan.

**Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Garis Tren Anak Putus Sekolah di Kabupaten Bantul**

Hasil perhitungan analisis tren yang telah dilakukan pada pendidikan dasar dipengaruhi oleh perkembangan suatu kejadian dimasa lampau. Hal ini diperkuat oleh Supangat (2008:167) menyatakan bahwa data deret waktu tidak hanya

dipengaruhi oleh satu faktor saja, melainkan berbagai faktor penentu, misalnya: bencana alam, manusia, selera konsumen, keadaan musim, kebiasaan, dan lainnya. Hasil dari perhitungan tren sangat dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor perubahan dan perkembangan di masa lampau. Dengan demikian naik atau turunnya suatu garis tren anak putus sekolah pada pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.

Tabel 1. Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah

Pada Pendidikan Dasar di Kabupaten Bantul			
No	Jenjang	Faktor Penyebab	
		Internal	Eksternal
1.	Jenjang SD/MI	Ketidakpercayaan diri dalam mengikuti pembelajaran dan rendahnya minat anak untuk bersekolah.	Kondisi ekonomi keluarga, kesadaran orang tua rendah dan pendidikan orang tua.
2.	Jenjang SMP/MTs	-	Kesadaran orang tua, pendapatan orang tua, dan akses ke sekolah jauh

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa faktor penyebab anak putus sekolah pada pendidikan dasar di Kabupaten Bantul

yang mempengaruhi hasil tren APtS, sebagai berikut ini:

### 1. Faktor Internal

#### a. Ketidakpercayaan Diri Dalam Mengikuti Pembelajaran

Kepercayaan diri merupakan keyakinan atas kemampuan mereka sendiri serta memiliki pengharapan yang realistis Mujiati, Nasir, dan Ashari (2018:277). Ketidakpercayaan diri pada dalam mengikuti pembelajaran tidak hanya mempengaruhi anak dalam berprestasi tetapi juga berdampak terhadap keinginan anak untuk *dropout*.

Penyebab anak putus sekolah di Kabupaten Bantul juga disebabkan oleh ketidakpercayaan diri karena IQnya dibawah rata-rata hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang SD Dikpora Bantul. Hal ini mendorong dan mengikis kemauan anak untuk bersekolah.

#### b. Rendahnya Minat Anak Untuk Sekolah

Penyebab terjadinya anak putus sekolah tidak hanya berasal dari orang tua tapi juga rendahnya minat anak sendiri untuk dapat melanjutkan pendidikannya. Sabarudin, Iru, dan Syahrir (2018:247) menjelaskan bahwa minat merupakan momen dari

kecenderungan yang agak menetap untuk merasa tertarik pada bidang tertentu dan merasa senang berkecimpung pada bidang itu. Jadi, minat merupakan sebuah dorongan yang ada pada diri untuk dapat menyukai atau tertarik akan suatu hal.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan disebutkan bahwa anak-anak yang mengalami putus sekolah di Kabupaten Bantul, mempunyai kecenderungan lebih menyukai untuk bekerja membantu perekonomian keluarga. Hal ini disebabkan karena mereka beranggapan bahwa pendidikan hanya akan membuang-buang uang saja. Sehingga, pola pikir yang demikian akan sangat mempengaruhi cara mereka untuk bertindak dan melakukan sesuatu. Anak yang sudah dapat mencari uang sendiri tanpa terasa mereka akan meninggalkan pendidikannya begitu saja karena dianggap bekerja lebih menghasilkan dibandingkan dengan bersekolah.

### 2. Faktor Eksternal

#### a. Rendahnya Pendidikan Orang Tua

Kondisi orang tua secara langsung sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahman

(2013:68) yang menyatakan bahwa masa anak-anak adalah tahap transisi, fase ketika orang tua mulai berbagi kekuasaan dan pengambilan keputusan dengan anak-anak mereka. Dengan demikian pada masa transisi tersebut anak mempunyai pengalaman yang terbatas sehingga pengambilan keputusan dan aturan sebagian besar ditetapkan oleh orang tua.

Jika dilihat berdasarkan data rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Bantul sebesar 9,55 tahun di 2020 (Bappeda, 2020). Hal ini menunjukkan jika rata-rata pendidikan masyarakat di Kabupaten Bantul hanya sampai jenjang SMP/MTs. Diungkapkan oleh Kepala Bidang SD bahwa rendahnya tingkat pendidikan orang tua tersebut menjadi indikasi bahwa pendidikan bukan menjadi suatu hal yang penting. Sehingga, menjadikan anak juga ikut terbawa untuk tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan bahkan putus sekolah.

b. Kondisi Ekonomi Orang Tua

Melalui UU No 20 Tahun 2003 pada Pasal 34 (2) tentang Sisdiknas pemerintah menjamin

terselenggaranya wajib belajar minimal pada pendidikan dasar tanpa adanya pungutan biaya. Meskipun pemerintah memberikan bantuan pembebasan biaya pendidikan dasar dan juga bantuan tunai untuk dapat memenuhi kebutuhan sekolah bagi siswa. Namun sebagai akibat dari lemahnya perekonomian keluarga orang tua memilih agar anaknya membantu bekerja mencari nafkah.

Sebagian besar orang tua yang berada di beberapa kecamatan di Kabupaten Bantul bekerja sebagai petani gurem dan buruh menjadikan mereka tidak memiliki penghasilan tetap hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang SMP Dikpora Bantul. Mereka merasa bahwa pendidikan bukanlah suatu hal yang penting karena hanya akan menjadi beban tambah dalam menjalani kehidupan. Hal ini yang menjadi faktor penyebab masih adanya anak putus sekolah di Kabupaten Bantul.

Angka putus sekolah di Kabupaten Bantul juga disebabkan karena banyak orang tua yang meminta anaknya untuk dapat meneruskan usahanya. Lemahnya perekonomian keluarga memaksa

anak untuk bekerja membantu mencari nafkah dan meneruskan usaha keluarga.

c. Kesadaran Orang Tua Rendah

Pendidikan menjadi sebuah investasi masa depan bagi masyarakat saat ini. Pendidikan seseorang akan sangat berpengaruh terhadap aktivitas dalam bertindak. Utamanya orang tua yang mempunyai pemahaman terhadap pentingnya pendidikan akan sangat berbeda dengan orang tua yang tidak memiliki pemahaman tersebut.

Sabarudin, Iru, dan Syahrir (2018:252) mengungkapkan bahwa pemahaman orang tua terhadap pentingnya pendidikan cukup mempengaruhi angka putus sekolah anak. seperti halnya di Kabupaten Bantul masih terdapat beberapa orang tua yang masih memandang bahwa pendidikan tinggi bukanlah hal yang penting. Beberapa orang tua lebih suka meminta anaknya untuk bekerja meneruskan usaha keluarga dibandingkan dengan bersekolah. Dengan pemahaman yang sempit tersebut mengakibatkan kebanyakan anak-anak mengalami putus sekolah dan bahkan mereka tidak bersekolah.

d. Akses ke Sekolah

Kemudahan akses menuju ke sekolah sangat berpengaruh terhadap kemudahan anak untuk bersekolah. Jika jarak tempat tinggal dengan sekolah dekat akan lebih meningkatkan intensitas kehadiran siswa di sekolah jika sebaliknya maka siswa akan sulit untuk mencapai sekolah. Aksesibilitas dikatakan baik apabila waktu tempuh rata-rata yang relatif singkat atau pendek dan biasanya dinyatakan dalam satuan waktu seperti menit atau jam (Arizona, 2011:156).

Waktu yang dibutuhkan siswa untuk sampai ke sekolah sangat mempengaruhi kehadiran siswa di sekolah. Hal ini terjadi di Kecamatan Dlingo dan Selopamioro (Imogiri) Kabupaten Bantul dengan akses jalan pegunungan yang naik turun menjadikan anak untuk memilih tidak hadir di sekolah atau bahkan putus sekolah hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang SD dan SMP Dikpora Bantul. Dengan kondisi alam dan geografis tersebut ditambah dengan latar belakang orang tua yang bekerja sebagai petani gurem dan buruh

semakin memperbesar peluang anak untuk putus sekolah.

### **Kebijakan dan Tindak Lanjut Pemerintah untuk Mengurangi Anak Putus Sekolah pada Pendidikan Dasar**

Peran pemerintah Kabupaten Bantul untuk mengurangi anak putus sekolah melalui berbagai kebijakan sangat penting untuk diupayakan. Rohman (2012:165) berpendapat bahwa birokrasi pendidikan memiliki wewenang atau kekuasaan administrasi pemerintahan dalam memberikan layanan publik, pengawasan publik, serta pengenalan partisipasi publik dalam bidang pendidikan.

Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik (*public policy*) atau dengan kata lain kebijakan pemerintah dibidang pendidikan yang memuat perencanaan umum, jangka panjang, menengah dan pendek, serta langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan (Madjid, 2018:7). Proses pengentasan dan pemberdayaan anak yang mengalami putus sekolah telah diupayakan oleh masing-masing bidang baik SD dan SMP di Dikpora Bantul melalui berbagai program dan kebijakan yang diimplementasikan.

Berbagai kebijakan telah diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Bantul akan

tetapi kebijakan tersebut belum berhasil untuk menekan angka putus sekolah pada pendidikan dasar. Proses analisis kebijakan publik merupakan serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan didalam sebuah kegiatan yang bersifat politis. Kegiatan ini mencakup proses prediksi, masalah, dampak kebijakan yang diperoleh maka selanjutnya adalah proses pengambilan kebijakan. Proses pengambilan kebijakan juga disebut dengan pengambilan keputusan dalam sebuah kebijakan.

Keputusan kebijakan (*policy decisions*) merupakan keputusan yang dibuat oleh pembuat kebijakan yang dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik (Taufiqurokhman, 2014:49). Keputusan kebijakan berarti merupakan tindak lanjut dari hasil analisis tren anak putus sekolah pada pendidikan dasar di Kabupaten Bantul.

Hal ini sejalan dengan pendapat Atmaja (2009:167) *time series* dianalisis untuk mendapatkan pengukuran-pengukuran yang dapat digunakan untuk membuat keputusan, memprediksi, dan merencanakan operasi di waktu mendatang. Untuk itu, adanya hasil dari analisis tren ini dapat memberikan keputusan atau kebijakan yang sesuai.

Melalui hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Bidang SD dan SMP di Dikpora Bantul bahwa kebijakan dan tindak lanjut yang dilakukan mempunyai perbedaan dan kesamaan, sebagai berikut ini:

## 1. Bidang SD

Tabel 2. Kebijakan Bidang SD

Kebijakan	Program	Kegiatan
Kebijakan Pembiayaan	1) PIP 2) BOS 3) BOSDA	1) Sosialisasi melalui Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan pengawas 2) Menjalinkan kerjasama dengan pihak sekolah 3) Monitoring dilakukan dengan datang kesekolah
Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul No 86 Tahun 2020	Penerimaan Peserta Didik Baru TK, SD, dan SMP di Kabupaten Bantul	1) Sosialisasi kepada setiap sekolah SD/MI di Kabupaten Bantul 2) Merekomendasikan ke dalam juknis PPDB "Anak Usia 7-12 Tahun Wajib Diterima"
Perda Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015	Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas	1) Menjalinkan kerjasama dan komunikasi dengan berbagai lintas 2) Melakukan sosialisasi dengan pihak sekolah 3) Penyediaan Guru Pendamping Khusus

Implementasi kebijakan yang diupayakan oleh Dikpora Bantul khususnya bidang SD untuk dapat menekan kasus anak putus sekolah berupa kegiatan sosialisasi dan monitoring yaitu

dengan menjalin kerjasama dengan bermitra melalui pengawas yang nantinya dapat disosialisasikan ke sekolah. Nantinya bidang SD akan menyampaikan bentuk kebijakan seperti apa dan akan disebarluaskan melalui pengawas dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan dibantu untuk menyampaikannya kepada sekolah-sekolah SD/MI yang terdapat di Kabupaten Bantul.

Melalui visinya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul yang berbunyi "Cerdas Sehat Berakhlak Mulia Berkepribadian Indonesia". Kata cerdas menjadi tujuan dan semangat dari Dikpora Bantul untuk dapat mencapai visi tersebut. Berbagai kebijakan dan program telah banyak diupayakan oleh bidang SD. Akan tetapi berbagai macam kebijakan yang telah diupayakan oleh bidang SD masih belum dapat menekan kasus anak putus sekolah. Hal ini dibuktikan dengan prediksi anak putus sekolah yang semakin meningkat di masa yang akan datang.

Bidang SD Dikpora Bantul menindaklanjuti hasil tren dari anak putus sekolah untuk jenjang SD/MI di Kabupaten Bantul melalui berbagai macam terobosan. Tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah khususnya

bidang SD yaitu melalui peningkatan kesadaran kepada masyarakat melalui berbagai macam kegiatan.

Bidang SD juga akan mengupayakan untuk menjalin kerjasama dan komunikasi dengan berbagai lintas instansi. Sehingga, harapan kedepannya peningkatan anak putus sekolah di tahun mendatang tidak akan terjadi. Dimana berdasarkan prediksi yang telah dilakukan anak putus sekolah pada jenjang SD selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

## 2. Bidang SMP

Tabel 3. Kebijakan Bidang SMP

Kebijakan	Program	Kegiatan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 19 Tahun 2016	Program Indonesia Pintar (PIP)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sosialisasi di setiap sekolah jenjang SMP di Kabupaten Bantul</li> <li>2) Melakukan diskusi dengan Komisi D (Pendidikan)</li> <li>3) Menjalinkan kerjasama dengan lintas OPD</li> </ol>
Pendidikan Nonformal	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menjalinkan kerjasama hingga ke unit paling kecil</li> <li>2) Pelibatan penilik untuk memantau ketercapaian program</li> <li>3) Aktif bekerjasama dengan PNF untuk melakukan tracing dan pengawasan.</li> </ol>

Kebijakan yang telah diupayakan oleh Dikpora Bantul khususnya untuk bidang SMP untuk menekan kasus anak putus sekolah yaitu dengan memberikan bantuan-bantuan simultan seperti bantuan untuk sekolah inklusi dan beasiswa PIP untuk anak yang ekonominya lemah. Kebijakan ini diupayakan oleh pemerintah sebagai upaya untuk dapat meningkatkan partisipasi pendidikan dan menekan kasus anak putus sekolah.

Kebijakan *tracing* hingga unit yang paling kecil juga diupayakan supaya masyarakat dapat melaksanakan program wajib belajarnya. Hal ini diupayakan oleh pemerintah dengan menjalin kerjasama yang melibatkan berbagai perangkat yang terdapat di wilayah (Camat, Lurah, Dukuh, RT) dan stakeholder yang terdapat di dinas.

Bidang SMP juga melaksanakan pemberdayaan masyarakat sebagai alternatif pilihan untuk anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan formalnya melalui kegiatan PKBM. Bidang SMP dalam menjalankan program PKBM bekerjasama dengan PNF (Pendidikan Non Formal) bahkan untuk melaksanakan pengawasan PKBM melibatkan penilik.

Berbagai kebijakan telah diimplementasikan oleh bidang SMP, baik untuk pendidikan formal maupun non formal. Kebijakan yang diupayakan telah berhasil untuk menekan anak putus sekolah pada jenjang SMP/MTs. Hal ini dibuktikan dengan prediksi tren anak putus sekolah yang terus mengalami penurunan hingga 0% dan tidak terdapat penambahan kasus lagi dimasa yang akan datang.

Untuk dapat merealisasikan hasil tren anak putus sekolah dimasa yang akan datang Dikpora Bantul khususnya untuk bidang SMP berencana untuk mempertahankan zero kasus anak putus sekolah melalui berbagai strategi. Upaya yang dilakukan oleh bidang SMP yaitu terus berupaya meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Melakukan intervensi terhadap kebijakan juga diupayakan oleh bidang SMP. Hal ini dilakukan untuk terus menjaga APK dan APM yang diperoleh terus stabil dan bagus di tahun-tahun mendatang.

Upaya lain yang dilakukan yaitu dengan memaksimalkan daya dukung yang dimiliki oleh bidang SMP seperti guru, penilik, dan pengawas sehingga peran mereka lebih dominan. Terakhir yaitu terus senantiasa melakukan diskusi

dengan Komisi D (pendidikan) supaya dana pendidikan terus meningkat setiap tahunnya. Sehingga prediksi sepuluh tahun mendatang dapat benar-benar terjadi.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan Analisis Tren Angka Putus Sekolah Pada Pendidikan Dasar di Kabupaten Bantul, dapat disimpulkan:

1. Tren anak putus sekolah pada pendidikan dasar di Kabupaten Bantul sejak tahun 2021 sampai dengan 2030 untuk SD/MI dan SMP/MTs mengalami garis tren yang berbanding terbalik. Untuk jenjang SD/MI di Kabupaten Bantul mengalami tren naik (positif) sejak tahun 2021 hingga mencapai jumlah kasus anak putus sekolah sebanyak 9 anak di tahun 2030. Tingginya angka putus sekolah di jenjang SD/MI mengindikasikan buruknya akses pendidikan. Pada jenjang SMP/MTs di Kabupaten Bantul mengalami tren turun (negatif) hingga mencapai 0% kasus di tahun 2021 dan tidak ditemukan penambahan kasus di tahun-tahun mendatang. Angka putus sekolah yang telah mencapai 0% untuk jenjang SMP/MTs menunjukkan bahwa

keterjangkauan dan pemerataan pendidikan telah berhasil diupayakan.

2. Hasil perhitungan analisis tren anak putus sekolah pada pendidikan dasar dipengaruhi oleh faktor penyebab terjadinya anak putus sekolah. Faktor tersebut terbagi menjadi dua yaitu: faktor internal (kepercayaan diri dalam mengikuti pembelajaran dan rendahnya minat anak untuk sekolah) dan faktor eksternal (rendahnya pendidikan orang tua, kondisi ekonomi orang tua, kesadaran orang tua rendah, dan akses ke sekolah).
3. Kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk dapat menekan anak putus sekolah jenjang SD/MI dengan menggiatkan program wajar 9 dan 12 tahun, pemberian rekomendasi kedalam juk nis PPDB, memberikan kemudahan aksesibilitas, bantuan sosial, jalur PPDB afirmasi, dan program sekolah inklusi. Tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah khususnya bidang SD yaitu melalui peningkatan penyadaran kepada masyarakat melalui berbagai macam kegiatan dan menjalin kerjasama dan komunikasi dengan berbagai lintas instansi. Bidang SMP mengupayakan berbagai macam kebijakan untuk dapat

menekan kasus anak putus sekolah pada jenjang SMP/MTs yaitu adanya penuntasan program wajib belajar 9 tahun, bantuan simultan, dan menjalin kerjasama atau kemitraan dan *tracing* hingga ke tingkat desa. Tindak lanjut yang bidang SMP berencana untuk mempertahankan zero kasus anak putus sekolah melalui berbagai strategi, berupaya meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), melakukan intervensi terhadap kebijakan, memaksimalkan daya dukung yang dimiliki oleh bidang SMP sehingga peran mereka lebih dominan, dan senantiasa melakukan diskusi dengan Komisi D (pendidikan).

### **Saran**

Sebagai upaya dalam memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan, maka berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan tren angka putus sekolah pada pendidikan dasar di Kabupaten Bantul, dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut ini:

1. Kebijakan dan program yang telah diimplementasikan masing-masing bidang SD dan SMP di Dikpora Bantul untuk menekan kasus anak putus sekolah harus terus diupayakan dan berlanjut karena

berdampak kepada penurunan kasus anak putus sekolah.

2. Bagi bidang SD di Dikpora Bantul, berdasarkan hasil prediksi tren yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tren anak putus sekolah jenjang SD/MI belum dapat mencapai 0% dan terus mengalami kenaikan dari tahun-ketahun:
  - a. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk dapat memberikan layanan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas.
  - b. Penguatan dan pengaktifan kembali *tracing* untuk penjangkauan anak putus sekolah yang berkerja sama hingga ke unit yang paling kecil seperti dusun.
  - c. Perbaikan pengelolaan dan sinkronisasi data sehingga data yang termuat haruslah *by name by address* sehingga penanganan anak putus sekolah dapat tepat sasaran.
3. Bagi bidang SMP program *tracing* dan menjalin kerjasama dengan dengan berbagai lintas yang diselenggarakan harus terus diupayakan, sehingga estimasi tren anak putus sekolah sepuluh tahun mendatang dapat direalisasikan untuk jenjang SMP/MTs di Kabupaten Bantul.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arizona, M.M. (2011). *Kajian tentang Siswa Putus Sekolah pada Tingkat SMA/SMK di Kabupaten Gresik (Studi Kasus di Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik)*. Diambil pada tanggal 1 Juni 2021, dari <https://core.ac.uk/download/pdf/230703657.pdf>.
- Atmaja, L.S. (2009). *Statistika untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi Pertama*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Bappeda. (2020). *Rata-rata Lama Sekolah Data Vertikal Badan Pusat Statistik*. Diambil pada tanggal 1 Juni 2021, dari [http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data\\_dasar/index/514-rata-rata-lama-sekolah?id\\_skpd=29](http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/514-rata-rata-lama-sekolah?id_skpd=29).
- Depdikbud. (2003). *Undang-undang RI Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Evani, F.S. (2016). *Angka Putus Sekolah Sedikit, Dana Anak Miskin di DIY Tak Terserap*. Diambil pada 15 Januari 2021, dari <https://www.beritasatu.com/nasional/380543/angka-putus-sekolah-sedikit-dana-anak-miskin-di-diy-tak-terserap>.
- Kabupaten Bantul. -----. *Kepadatan Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2019*. Diambil pada tanggal 26 Mei 2021, dari [https://bantulkab.go.id/data\\_pokok/index/0000000008.html](https://bantulkab.go.id/data_pokok/index/0000000008.html).
- Madjid, A. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Samudra Biru
- Mujiati, Nasir, dan Ashari, A. (2018). *Faktor-faktor Penyebab Siswa Putus Sekolah*. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan*, 3.
- Nugroho, R. (2008). *Kebijakan Pendidikan Yang Unggul*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Putra, I.P. (2020). *4,3 Juta Siswa Putus Sekolah di 2019*. Diambil pada tanggal 15 Juli 2020, dari <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/9K50PI3k-4-3-juta-siswa-putus-sekolah-di-2019>.
- Rahadi, F. (2014). *Kemendikbud: Program Wajib Belajar 9 Tahun Telah Berhasil*. Diambil pada tanggal 26 Mei 2020, dari <https://republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/14/03/18/n2lbyy-kemendikbud-program-wajib-belajar-9-tahun-sudah-berhasil>.
- Rahman, H. (2013). *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta: PGTKI Press.
- Rembulan dan Afdhal. (2019). *Studi Analisis Anak Putus Sekolah di Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok*. Jurnal Buana, 5.
- Ridwan., Irawaty., dan Momo, A.H. (2019). *Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah (Studi di Desa Mapila Kecamatan Kabaena Utara Kabupaten Bombana)*. Jurnal Selami IPS, 12.
- Rohman, A. (2012). *Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: AswajaPressindo.
- Sabarudin, S., Iru, L.I.L., Syahrir, P. (2018). *Faktor-faktor Penyebab Putus Sekolah (Studi Desa Wanseriwu Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat)*. Jurnal Selami IPS, 47.
- Supangat, A. (2008). *Statistika: Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametrik Edisi Pertama Cetakan Kedua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Taufiqurakhman. (2014). *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Universitas Moestopo Beragama Pers.
- Unicef Indonesia. ----- . *Pendidikan dan Remaja “Membantu anak-anak dan remaja menjadi yang terbaik sesuai kemampuan mereka*. Diambil pada tanggal 11 Oktober 2020 dari <https://www.unicef.org/indonesia/id/pendidikan-dan-remaja>.
- . (2008). *433 Anak di Bantul Putus Sekolah*. Diambil pada tanggal 26 Mei 2021 dari <https://bandung.kompas.com/read/2008/10/31/17333943/443.anak.di.bantul.putus.sekolah>.